Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (Maret, Juni, September dan Desember) yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI)**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya serta kalangan masyarakat dan pemerhati hukum pada umumnya.

Pembina dan Penanggung Jawab

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Pemimpin Umum

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Wakil Pemimpin Umum

Yayah Mariani, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Dr. Agus Anwar, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

Pemimpin Redaksi

Akhyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU. (Hukum Islam)

Anggota Dewan Redaksi

Dr. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU. (Hukum Adat)

Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Hukum Bisnis)

Syprianus Aristieus, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan)

Nevey Farida Ariani, S.H., M.H. (Hukum Pidana)

Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)

Muhaimin, S.H. (Hukum Islam)

Redaksi Pelaksana

Yatun, S.Sos

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P

Asmadi, S.H.

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H.

Galuh Hadiningrum, S.H.

Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah S.ST., M.Si. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Teddy Suryotejo (Desain Layout)

Mitra Bestari

Prof. DR. Rianto Adi, S.H., M.A (Pakar Hukum Perdata dan Adat)

Prof.Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pertanian dan Humaniter)

Dr. Yunus Husein, S.H., M.H. (Pakar Hukum Perbankan)

Dr. Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pd. (Pakar Hukum Pidana dan Gender)

Dr. Hadi Supratikta, M.M. (Pakar Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan)

R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D.

(Pakar Hukum Tata Negara dan Budaya Hukum)

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email

jurnaldejure@yahoo.com

ejournaldejure@gmail.com

Percetakan

PT Pohon Cahaya

Jalan Gelong Baru Raya 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email: jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi *Open Journal System* (OJS) pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

ADVERTORIAL

Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

(Existence of The Act Number 21/2001 On

Special Authonomy of Papua Province) 61 - 75

Rooseno

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat-Nya, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di Tahun 2016 kembali akan hadir dihadapan para pembaca. Di Tahun 2016 ini, penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* bertepatan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum yang berada di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pusat Kebijakan dan Pengembang Sekretariat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dijadikan dibawah satu Badan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.

Sehubungan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum di BADANLITBANGKUMHAM tersebut, diiringi pula dengan dijalinnya kerjasama antar IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA dan Pusat Dokumentasi dan Informasi BALITBANGKUMHAM dalam menerbitkan dan mempublikasikan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure di Tahun 2016*.

Pembaca setia *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, dalam Volume 16 Nomor 1, Maret 2016 ini redaksi memuat beberapa tulisan dari penulis yang berprofesi sebagai peneliti instansi pemerintah, akademisi dan para perancang peraturan perundang-undangan yang berada di daerah.

Diantara tulisan tersebut yaitu, Kebijakan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (Djbc) Dalam Bidang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite). Salah satu devisa negara yaitu berasal dari Ekspor jika beberapa kemudahan itu bisa dilakukan maka pemerintah telah membantu masyarakat dalam bidang ekspor yang dapat menambah eksistensi dari negara terhadap pendapatan yang berasal dari ekspor termasuk Implikasi Hukum Pemberian Kredit terhadap masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah yang membutuhkan mekanisme pemberian kredit untuk menunjang produktifitas dalam ekspor.

Oleh karena itu berbagai upaya termasuk aliran dana baik yang berasal dari hasil ekspor maupun usaha lain yang menguntungkan masyarakat bangsa dan negara secara benar dan wajar seta bukan merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang, namun apabila aliran dana itu jika patut diduga sebagai tindak kejahatan maka Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya percepatan Penarikan aset Koruptor segera melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang untuk merampas aset tersebut yang berasal dari hasil kejahatan dan Peranan Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi menjadi pilar dalam penyelesaian permasalahan korupsi di Indonesia yang tak kunjung memberikan harapan baru bagi pemerintahan berupaya dalam pemberantasan korupsi.

Disamping itu, juga memuat tulisan berkaitan dengan Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Kebijakan Pemerintah Dalam Aspek Perizinan di Bidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Era Otonomi Daerah, Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Starategi Pengembangan Budaya Hukum.

Semoga dengan penerbitan beberapa tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka memperkaya pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang hukum

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Haksasi Manusia dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia atas terjalinnya kerjasama penerbitan dan publikasi jurnal Penelitian Hukum De Jure. Dan ucapan terima kasih kepada Ibu Prof.DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,MH., DR.Dra. Farhana, S.H.,M.H., Bapak DR. Yunus Husin, S.H.,LL.M., DR. Herlambang, S.H., DR. Hadi Supraptika, yang telah bersedia menjadi Mitra Bestari dalam penerbitan ini. Selamat membaca.

Jakarta, Maret 2016

Redaksi

EKSISTENSI
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
(Existence of The Act Number 21/2001 On Special Authonomy of Papua Province)

Rooseno
Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM,
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan
Jalan May.Jend. Sutoyo No. 10 – Cililitan, Jakarta Timur
Email: r.harjowidigdo@gmail.com
Tulisan diterima 13-1-2016, Direvisi 29-2-2016, Disetujui Diterbitkan 28-3-2016

ABSTRACT

There are 13 airports in Papua and West Papua provinces, its land was recorded in the Besluit van de Nederlands Nieuw Guenia Gouverneur Number 63 /1961, dated on February 22 ,however, it do not recognized by common law of Papuans because of having no transfer of right`s certificate`s on land and certificate of right`s disengagement on customary land. Therefore, customary law communities want to replace the loss turn into money, also require compensation increasing their livelihoods, education, jobs, and many more. Hence, it will be wise, if provincial government of Papua, House of Regional Representatives (DPRD), and Indonesia Government c.q. the Ministry of Transportation of Indonesia agree and compromise after damages assesment of the Act No. 2/2012 provisions to pay compensation in order to improve the living standards of indigenous peoples, education, jobs, and providing airport manager of Corporate Social Responsibility (CSR).

Keywords: 13 airports land, conflict of customary law communities, the Ministry of Transportation of Indonesia

ABSTRAK

Ada 13 Bandara yang terletak di provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tanah dimasukkan dalam Besluit van de Nederlands Nieuw Guenia Gouvernour nomor 63 tahun 1961 22 Februari 1961, tetapi itu tidak diakui oleh hukum masyarakat adat karena tidak ada transfer sertifikat hak atas tanah dan sertifikat pelepasan hak atas tanah adat. Jadi karena itu masyarakat hukum adat ingin mengganti kerugian dalam bentuk uang, juga memerlukan kompensasi yang meningkatkan mata pencaharian masyarakat adat, pendidikan, pekerjaan, dan banyak lagi. Oleh karena itu bijaksana jika pemerintah provinsi Papua, DPRD, dan pemerintah Republik Indonesia c. q Kementerian Perhubungan setuju dan dikompromikan-setelah penilaian kerusakan dibawah ketentuan dari undang-undang 2/2012 – membayar ganti rugi, uang kompensasi untuk meningkatkan standar hidup masyarakat adat, pendidikan, pekerjaan, dan menyediakan manajer Bandara CSR (Corporate Social Responsibility) Komunitas hukum di tanah di van Besluit Belanda Nieuw Guenia Gouvernour nomor 63 tahun 1961 22 Februari 1961.

Kata kunci: 13 Tanah Bandar Udara, konflik, masyarakat hukum adat, Departemen Perhubungan.

PENDAHULUAN

Bahwa dalam Proposal Focus Group Discussion “*Tuntutan Ganti Rugi Tanah Masyarakat Adat di Papua dan Papua Barat Terhadap Tanah Bandar Udara Yang Masuk Dalam Besluit van Gouvernour van Nederlands Nieuw Guinea Nomor 63 Tahun 1961*”, halaman 1 disebutkan, Proposal Focus Group Discussion “*Tuntutan Ganti Rugi Tanah Masyarakat Adat di Papua dan Papua Barat Terhadap Tanah Bandar Udara Yang Masuk Dalam Besluit van Gouvernour van Nederlands Nieuw Guinea Nomor 63 Tahun 1961*”, halaman 1 terdapat 13 bandar udara, yaitu Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Mopak Merauke, Bandar Udara Jeffman Sorong, Bandar Udara Frans Kasiepo Biak, Bandar Udara Randani Manokwari, Bandar Udara Sarmi Orai, Bandar Udara Noefor Kamoiri, Bandar Udara Kokonau Mika, Bandar Udara Kaimana Utarom, Bandar Udara Ransiki Abresso, Bandar Udara Genyem Jayapura, Bandar Udara Wakde Jayapura, Bandar Udara Tanah Merah, berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tanahnya masuk dalam Besluit van de Gouvernour Nederlands Nieuw Guenia Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 22 Februari 1961.

Secara hukum tanah *Besluit van de Gouvernour Nederlands Nieuw Guenia* Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 22 Februari 1961 adalah tanah negara yang telah dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Kerajaan Belanda, namun hal itu tidak diakui oleh Masyarakat Hukum Adat (Ulayat) karena belum ada surat keterangan pengalihan hak atas tanah dan surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat. Sehingga oleh karenanya Masyarakat Hukum Adat menghendaki ganti kerugian berupa uang, juga menghendaki kompensasi yang bersifat meningkatkan taraf hidup masyarakat adat, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Di samping itu juga terdapat pihak ketiga yang mengkalim kepemilikan atas tanah yang digunakan sebagai bandara tersebut.

Memperhatikan kejadian yang demikian, apakah Pemerintah akan menempuh jalur hukum dengan bukti-bukti yang dimiliki serta kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk melawan Masyarakat Hukum Adat? Atau, apakah Pemerintah akan melakukan musyawarah terhadap Masyarakat Hukum Adat

dengan memberikan ganti rugi dan kompensasi dikaitkan dengan Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat?

HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH

Hak menguasai negara menurut ketentuan UU 5/1960 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) Pasal 2 ayat (2) adalah: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah. Mengenai pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

1. Hak Atas Tanah oleh Bukan Negara

Atas dasar hak menguasai dari Negara dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah

yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Dalam konteks ini menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bertanggal 16 Mei 12013 yang menentukan, bahwa: Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: *“penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”*.

Adapun hak-hak atas tanah menurut UU 5/1960 Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. hak milik; b. hak guna-usaha; c. hak guna-bangunan; d. hak pakai; e. hak sewa; f. hak membuka tanah; g. hak memungut hasil hutan; dan h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Adapun hak-hak yang sifatnya sementara menurut UU 5/1960 Pasal 53 ayat (1) ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang

bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

Menurut Kasubdit Hak Atas Ruang, Hak Komunal dan Perpanjangan Hak, Badan Pertanahan Kotamadya Manado dalam makalahnya berjudul: *“Tanah Tanah Bekas Milik Belanda di Indonesia”*, hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi wewenang bagi subyeknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya, yang terdiri dari:

a. Hak Atas Tanah Orisinil atau Primer

Hak Atas Tanah Orisinil atau Primer adalah hak atas tanah yang bersumber pada hak bangsa Indonesia dan diberikan oleh negara dengan cara permohonan hak, yang terdiri dari: a. Hak Milik; b. Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara; c. Hak Guna Usaha; dan d. Hak Pakai Atas Tanah Negara.

b. Hak Atas Tanah Derivatif atau Sekunder

Hak Atas Tanah Derivatif atau Sekunder adalah hak atas tanah yang tidak langsung bersumber kepada hak bangsa Indonesia dan diberikan melalui perjanjian antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak, yang terdiri dari: a. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik atau Hak Pengelolaan; b. Hak Pakai atas tanah Hak Milik atau Hak Pengelolaan; c. Hak Sewa; d. Hak Usaha Bagi Hasil; e. Hak Gadai; dan f. Hak Menumpang.

Hak Atas Tanah Orisinil dan Hak Atas Tanah Derivatif jika digambarkan adalah sebagai berikut:

Sedangkan Tanah Negara Bekas jika digambarkan adalah sebagai berikut:

Kiranya ciri-ciri MHA tersebut diadopsi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA BERDASARKAN UU 21/2001 DAN PERATURAN LAINNYA

Menurut pendapat para ahli hukum adat, bahwa ciri-ciri Masyarakat Hukum Adat – selanjutnya disingkat MHA – adalah: i. adanya kesatuan manusia secara teratur; ii. menetap di suatu daerah tertentu; iii. mempunyai penguasa-penguasa; iv. Mempunyai kekayaan materiil (berwujud) dan immateriil (tidak berwujud); v. memiliki sisten nilai dan kepercayaan; dan vi. memiliki tatanan hukum tersendiri.

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 angka 1 ditentukan, bahwa MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Namun ada terminologi lain mengenai MHA ini yang ditentukan oleh Peraturan Menteri

Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Pasal 1 angka 3, bahwa MHA adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan kepada MHA (vide Permendagri 52/2014 Pasal 2). Sedangkan Bupati/Walikota menetapkan hak komunal atas tanah untuk (kepada) MHA atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, dalam hal tanah terletak pada satu Kabupaten/Kota. Atau, Gubernur menetapkan hak komunal atas tanah untuk (kepada) MHA atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/ Kota (vide Permenagraria/Kepala BPN 9/2015 Pasal 13).

Perlu disampaikan bahwa setelah melakukan penelusuran serius terhadap Permendagri 52/2014, ternyata Permendagri tersebut tidak mengatur Gubernur melakukan “pemberian pengakuan dan perlindungan kepada MHA”, tetapi Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya (vide Pasal 9 ayat 2). Bahkan Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Berbeda dengan masalah pemberian pengakuan hak atas tanah kepada MHA. Maka jelas bahwa Bupati/Walikota menetapkan hak komunal atas tanah kepada MHA atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, dalam hal tanah terletak pada satu Kabupaten/ Kota. Atau, Gubernur menetapkan hak komunal atas tanah untuk (kepada) MHA atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/Kota.

Dengan demikian antara Permendagri 52/2014 dan Permen- agraria/Kepala BPN 9/2015 memiliki maksud pemberian yang memiliki satu kesatuan, dimana Permendagri dengan syarat tertentu memberikan pengakuan terhadap keberadaan MHA, sedangkan Permenagraria/

Kepala BPN dengan syarat tertentu memberikan pengakuan hak atas tanah kepada MHA.

1. Pemberian dan Pengakuan Terhadap Keberadaan MHA

Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan MHA, Permendagri 52/2014 menentukan, bahwa Bupati/Walikota membentuk Panitia MHA Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Panitia MHA). Adapun Struktur Organisasi Panitia MHA terdiri atas: (i) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai ketua; (ii) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan (iii) sebagai anggotanya adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten/Kota, Camat atau sebutan lain, dan Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat setempat. Struktur Panitia MHA ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Adapun pemberian pengakuan dan perlindungan kepada MHA dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi MHA; b. verifikasi dan validasi MHA; dan c. penetapan MHA. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. Identifikasi itu dilakukan dengan mencermati: a. sejarah MHA; b. wilayah adat; c. hukum adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Hasil identifikasi MHA yang dilakukan oleh Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia MHA. Hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Panitia MHA berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukannya menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota. Singkatnya, Bupati/ Walikota menetapkan “Keputusan Kepala Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”. Dalam hal MHA berada di dua atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan MHA ditetapkan dengan “Keputusan Bersama Kepala Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”.

Apabila MHA keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi yang dibuat oleh Panitia MHA, maka MHA dapat mengajukan keberatan kepada Panitia MHA. Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi ulang satu kali terhadap keberatan MHA tersebut. Dalam hal MHA keberatan terhadap “*Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*” atau “*Keputusan Bersama Kepala Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*”, MHA dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Apakah “*Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*” atau “*Keputusan Bersama Kepala Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*”, itu juga berlaku terhadap MHA di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang tanahnya masuk dalam Besluit van de Gouverneur Nederlands Nieuw Guenia Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 22 Februari 1961?

Permendagri 52/2014 tidak mengatur ketentuan peralihan. Namun demikian keberadaan MHA di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat “kehidupannya” berada di tanah yang masuk dalam Besluit van de Gouverneur Nederlands Nieuw Guenia Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 22 Februari 1961, tetap sah dan dapat diberikan *Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.

2. Pemberian dan Pengakuan Hak Atas Tanah Kepada MHA

Dalam melakukan “pemberian dan pengakuan hak atas tanah kepada MHA”, Permenagraria/Kepala BPN 9/2015 menentukan, bahwa Masyarakat Hukum Adat – selanjutnya disingkat menjadi MHA – yang meliputi: i. Masyarakat masih dalam bentuk paguuban, ii. Ada kelembagaan, iii. Ada wilayah hukum adat yang jelas, dan iv. ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati, dapat dikukuhkan hak atas tanahnya dalam bentuk hak komunal. Hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat (atau hak milik

bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan). Sedangkan proses pemberian hak komunalnya dilakukan oleh Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah atau disingkat menjadi Tim IP4T.

Kepala Adat MHA mengajukan permohonan untuk dikukuhkan hak atas tanahnya kepada Bupati/Walikota atau Gubernur. Permohonan tersebut disertai riwayat MHA dan riwayat tanahnya. Selanjutnya Bupati/Walikota atau Gubernur membentuk Tim IP4T untuk menentukan keberadaan MHA.

Jika tanah yang dimohonkan berada dalam satu Kabupaten/Kota, maka Tim IP4T terdiri dari: i. Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; ii. Anggota adalah Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk, Lurah/Kepala Desa setempat; iii. Pakar hukum adat; Perwakilan MHA; iv. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan v. Instansi yang mengelola sumber daya alam. Jika tanah yang dimohonkan berada dalam satu Kabupaten/Kota, maka Tim IP4T terdiri dari: i. Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; ii. Anggota adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk, Lurah/Kepala Desa setempat; iii. Pakar hukum adat; Perwakilan MHA; iv. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan v. Instansi yang mengelola sumber daya alam.

Tim IP4T bertugas: i. Menerima permohonan; ii. Melakukan identifikasi dan verifikasi pemohon, riwayat tanah, jenis, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah; iii. Mengidentifikasi dan menginventarisasi batas tanah; iv. Pemeriksaan lapangan; v. Melakukan analisis data yuridis dan data fisik bidang tanah; dan vi. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas IP4T kepada Bupati/Walikota atau Gubernur. Berita Acara Hasil Pemeriksaan IP4T antara lain memuat: i. Ada tidaknya MHA; ii. Nama pemimpin dan anggota MHA; dan iii. Data tanah dan riwayat pemilikan dan/atau penguasaan tanah.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas IP4T menyatakan adanya MHA dan tanahnya, maka: i. Bupati/Walikota menetapkan hak komunal atas tanah kepada MHA dalam hal tanah berada dalam satu Kabupaten/Kota; atau, ii. Gubernur menetapkan hak komunal atas tanah kepada MHA dalam hal tanah berada dalam hal tanah berada dalam lintas Kabupaten/Kota.

Apakah penetapan hak komunal atas tanah kepada MHA itu juga berlaku terhadap MHA di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang tanahnya masuk dalam Besluit van de Gouverneur Nederlands Nieuw Guenia Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 22 Februari 1961? Pada saat Permenagraria/Kepala BPN 9/2015 ini mulai berlaku, maka MHA dan hak atas tanahnya yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelum Permenagraria/Kepala BPN 9/2015 ini berlaku, tetap sah dan dapat diberikan hak komunal atas tanahnya (*vide* Permenagraria/Kepala BPN 9/2015 Pasal 17 huruf a).

3. RUU Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 ditentukan, telah ditetapkan 160 RUU dengan salah satunya adalah RUU tentang Perubahan atas UU 21/2001 ttg Otsus Bagi Provinsi Papua sebagai inisiatif DPR dalam Nomor 16 dan RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat sebagai inisiatif DPR/DPD dalam Nomor 42.

Sekilas dapat disampaikan alasan Baleg (Matrix Usulan Perubahan Terhadap RUU PPHMA Versi Baleg) dalam menyusun RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat antara lain: bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak

pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.

Sedangkan materi muatan RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat antara lain: 1. Masyarakat Hukum Adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. 2. Sumber daya alam tersebut mencakup segala sesuatu yang berada di permukaan tanah maupun di dalam tanah. 3. Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengendalikan. 4. Masyarakat Hukum Adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pengembangan atau penggunaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal dan inovasi-inovasi yang berkembang dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

PENGADAAN TANAH BANDARA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dalam konsiderans menimbang huruf b UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah - kemudian disebut UU 2/2012 - ditentukan, bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Sedangkan yang dimaksud Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, yaitu pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain digunakan untuk pembangunan pelabuhan, **bandar udara**, dan terminal. Sedangkan tanahnya itu sendiri menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dapat berasal dari Pihak yang Berhak. Sedangkan

yang dimaksud dengan Pihak yang Berhak menurut ketentuan Pasal 1 angka 3, yaitu pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Pihak yang Berhak tersebut dapat sebagai perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai obyek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai: a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang pengelolaan; c. nadzir untuk tanah wakaf; d. pemilik tanah bekas milik adat; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik; g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah (*vide* PP 71/2012 Pasal 17). Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum – dalam hal ini bandar udara – diselenggarakan oleh Pemerintah. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum (*vide* UU 2/2012 Pasal 4). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; dan d. penyerahan hasil. Instansi yang memerlukan tanah – dalam hal ini Kementerian Perhubungan – bersama Pemerintah Provinsi berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan: a. pemberitahuan rencana pembangunan; b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah; c. letak tanah; d. luas tanah yang dibutuhkan; e. gambaran umum status tanah; f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; h. perkiraan nilai tanah; dan i. rencana penganggaran.

Sedangkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah – yang disusun berdasarkan studi kelayakan - paling sedikit memuat: a. maksud

dan tujuan rencana pembangunan; b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah; c. letak tanah; d. luas tanah yang dibutuhkan; e. gambaran umum status tanah; f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; h. perkiraan nilai tanah; dan i. rencana penganggaran.

Konsultasi Publik dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak – dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat – dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati. Atas dasar kesepakatan itu, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Gubernur – dalam hal ini Gubernur Papua – menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan. Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi: a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; b. penilaian Ganti Kerugian; c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian; d. pemberian Ganti Kerugian; dan e. pelepasan tanah Instansi. Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Beralihnya hak dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

2. Penilaian Ganti Kerugian

Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah. Penilai yang ditetapkan wajib bertanggungjawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan. Nilai Ganti Kerugian

berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak (vide UU 2/2012 Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, dan Pasal 36).

Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 14 hari kerja, karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian.

3. Jika Tidak Terjadi Kesepakatan

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak - d.h.i Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat - dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat (masing-masing) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian.

Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan negeri/ Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar

pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan (vide Pasal 38 UU 2/2012).

4. Pemberian Ganti Kerugian

Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang telah ditetapkan dan/atau berdasarkan putusan pengadilan negeri/ Mahkamah Agung. Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: a. melakukan pelepasan hak; dan b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Bukti tersebut merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah menjadi tanggungjawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.

Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan/atau berdasarkan putusan pengadilan negeri/ Mahkamah Agung, maka Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. Di samping itu Penitipan Ganti Kerugian juga dilakukan terhadap: a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2. masih dipersengketakan kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadi jaminan di bank.

Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri, maka Objek kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku serta tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Menurut Data tanah di Kementerian Perhubungan berdasarkan “Data Simak BMN Per 30 Juni 2015, Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Berupa

Tanah di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Perlengkapan”, Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Luasan (M2)	Nilai (Rp)
1.	Sekretariat Jenderal	56.479	277.746.463.404
2.	Ditjen Perhubungan Darat	1.011.309	451.003.463.669
3.	Ditjen Perhubungan Laut	10.360.531	1.457.800.308.699
4.	Ditjen Perhubungan Udara	180.740.904	21.411.647.877.951
5.	Ditjen Perkeretaapian	113.374.269	36.771.101.512.911
6.	BPSDM Perhubungan	3.756.453	1.743.550.749.052
	TOTAL	309.299.945	62.112.850.375.686

Sedangkan menurut “*Rincian Evaluasi per sub sektor (dalam IHA) pada 168 UPT*”, adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Luasan Dalam SIMAK BMN (M2)	Luasan Rekon (M2)	Selisih (M2)	Sudah Bersertifikat (M2)	Belum Bersertifikat (M2)
1.	Sekretariat Jenderal	56.479	56.479	-	45.348	11.131
2.	Ditjen Perhubungan Darat	997.536	997.385	151	978.887	18.498
3.	Ditjen Perhubungan Laut	7.977.336	8.112.278	(134.942)	5.314.604	2.797.674
4.	Ditjen Perhubungan Udara	163.238.914	68.155.874	95.083.040	52.355.375	15.800.499
5.	Ditjen Perkeretaapian	2.642.888	2.734.362	(91.474)	840.731	1.893.631
6.	BPSDM Perhubungan	2.272.948	2.138.349	134.599	2.112.494	25.855
	TOTAL	177.186.101	2.194.727	94.991.374	61.647.439	20.547.288
	PROSENTASE				75 %	25 %

Sedangkan menurut “*Evaluasi Tanah di Ditjen Perhubungan Udara (Iha) pada 58 UPT*”, adalah sebagai berikut:

Ketimpangan ekonomi, ii. Ketidakadilan sosial, iii. Penguasaan sumber hidup, iv. Dominasi dan alih kuasa terhadap sumber strategis, v. Pertentangan

Dengan demikian berdasarkan UU 2/2012 beserta peraturan pelaksanaannya yang didukung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3, di mana “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*,” maka Kementerian Perhubungan yang memerlukan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat melaksanakan pembangunan selanjutnya di atas ke 13 bandar udara tersebut.

Namun demikian Pemerintah c.q Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan pembangunan selanjutnya di atas ke 13 bandar udara tersebut wajib mewujudkan Pembukaan UUD 1945 yang menentukan, bahwa: “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...*”

SUMBER KONFLIK DAN PENYELESAIANNYA

Sumber dan bentuk konflik sosial menurut M. Mas’ud Said Staf Khusus Menteri Sosial: “Penguatan Kereserian Sosial Dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial” adalah adanya: i.

modernisasi vs nilai adat dan lokalitas, vi. Perebutan kekuasaan dan tensi politik yang tak beraturan, vii. Dengki kelompok yang menyejarah dan adu domba, dan viii. Kebuntuan komunikasi dan aspirasi yang tersumbat.

Sedangkan untuk menyelesaikan konflik antar lembaga, misalnya antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mabes Polri beberapa waktu lalu, menurut Dimas Wahyu Satria dalam tulisannya: “*Strategi Pertahanan dan Resolusi Konflik*”, catatan kuliah Cohort 3 Naval Postgraduate School Monterey CA atas kerjasama Magister Program Studi Peace and Conflict Resolution, Indonesian Defense University, hal itu dikarenakan timbulnya friksi antar *stakeholder*. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya tarik menarik kepentingan antar lembaga. Sedangkan menurut Thomas s. Szayna, Derek Eaton, and Amy Richardson dalam bukunya: “*Preparing the Army for Stability Operations: Doctrinal and Interagency Issues*”, RAND Corporation, USA, tarik menarik kepentingan dapat terjadi karena faktor-faktor berikut, yaitu:

- Structural differences among agencies* (perbedaan struktur antara instansi);
- Competing bureaucrasies interests* (perbedaan kepentingan birokrasi);
- Differences in what planning is all about* (perbedaan perencanaan dalam berbagai hal);
- Information sharing practice* (tukar menukar informasi tentang praktek);
- Time pressures* (tekanan waktu);

- f. *Lack of understanding of planning by other agencies* (kurangnya pemahaman tentang perencanaan oleh instansi lain).

Dalam mengatasi hambatan dalam kerjasama antar lembaga menurut Thomas S. Szayna, Derek Eaton, Amy Richardson dalam bukunya berjudul: *"Preparing the Army for Stability Operations: Doctrinal and Interagency Issue"*, diperlukan beberapa kunci, yaitu:

- Menentukan tujuan bersama (*define and articulate a common outcome*);
- Mengembangkan strategi bersama yang dapat memperkuat masing-masing lembaga (*establish mutually reinforcing or joint strategies*);
- Menyetujui peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga (*agree on roles and responsibilities*); dan
- Membuat kebijakan, prosedur, maupun cara-cara lain yang dapat dioperasikan antar lembaga (*establish compatible policies, procedures, and other means to operate across agency boundaries*).

Mengenai konflik atas 13 bandar udara yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang tanahnya masuk dalam Besluit van de Gouverneur Nederlands Nieuw Guenia Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 22 Februari 1961, apakah Pemerintah – dalam hal ini Kementerian Perhubungan – apakah akan melakukan musyawarah terhadap Masyarakat Hukum Adat dengan memberikan ganti rugi dan kompensasi dikaitkan dengan Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat?

Menurut ketentuan UU 12/2002 Pasal 43, bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum

adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian penyediaan tanah ulayat warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, harus dilakukan melalui musyawarah dan mufakat oleh MRP, Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, dan Pemerintah Republik Indonesia c.q Departemen Perhubungan maupun dengan Masyarakat Hukum Adat sebagai penguasa atau pemilik tanah ulayat termasuk warga lain yang berhak untuk bersepakat mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalan ganti ruginya sesuai aturan UU 21/2001 maupun UU 2/2012.

RUU tentang Perubahan atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Sebagaimana telah disampaikan bahwa salah satu ancaman undang-undang yang ditetapkan oleh Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 adalah RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat sebagai inisiatif DPR/DPD dalam Nomor 42. Namun dengan memohon maaf tidak dapat disampaikan mengenai alasan maupun materi muatan RUU tentang Perubahan atas UU 21/2001 ttg Otsus Bagi Provinsi Papua karena belum memilikinya.

KESIMPULAN

Di satu sisi dalam kasus di atas Pemerintah dapat menempuh jalur hukum untuk mempertahankan keberadaan 13 bandar udara. Di sisi lain Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua.

Dengan demikian apakah Pemerintah akan menempuh jalur hukum dengan bukti-bukti yang dimiliki serta kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk melawan Masyarakat Hukum Adat? Atau, apakah Pemerintah akan melakukan musyawarah terhadap Masyarakat Hukum Adat dengan memberikan ganti rugi dan kompensasi dikaitkan dengan Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat?

Gambaran itu menunjukkan, jika masing-masing pihak mementingkan dirinya sendiri, maka tujuan berbangsa dan bernegara akan gagal. Pemerintah gagal memakmurkan rakyatnya, rakyatnya gagal memakmurkan dirinya. Sudah saatnya diakhiri istilah: *“Kami tidak mengakui Negara kalau Negara tidak mengakui Kami”*. Untuk itu masing-masing pihak *“bersama-sama bekerja untuk Indonesia maka pemerintah dan rakyat yang akan menikmatinya”*. Jika konflik diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, maka hasilnya menang dan menang seperti gambar di atas. Keledai saja bisa melakukannya, kenapa manusia tidak.

Hasil perselisihan melalui pengadilan adalah kalah dan menang. Hal itu dapat diberi contoh dalam kasus **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2164K/Pdt/2010**, sebagai berikut:

- **Para Pihak:** Pemerintah v Ahli Waris Yahya Felle;

- **Tuntutan:**

- Tanah seluas 150.000m² adalah tanah di luar Besluit sudah dibayar GR 5m;
- Tanah seluas 287.080m² masuk dalam Besluit agar dibayar GR:
 - ✓ Tanah: 287.080 M² x Rp500ribu = Rp143.540M;
 - ✓ P3: 47th x Rp100jt = Rp4.7M;
 - ✓ Immateriil: Rp1M;
 - ✓ Total: 149.240M

- **Putusan MA:**

- Hakim PN dan PT tidak faham gugatan dan memori banding;
- *“alasan dan dalam memutus perkara aquo sudah tepat dan benar”* oleh MA PN dan PT merupakan pertimbangan yang keliru;
- *“perempuan tidak mewaris”* juga merupakan pertimbangan yang salah;
- foto copy bukan bukti, yang diperlukan bukti asli;
- 1 saksi bukan saksi;
- Sampai sekarang belum ada kejelasan apakah Amerika dan Jepang sudah membayar ganti rugi Bandara Sentani” merupakan tanah obyek yang tidak jelas dan kabur.
- Menolak kasasi Ahli Waris Yahya Felle.

- **Saran**

- Pemerintah – d.h.i. Kemenhub – dalam pengadaan tanah untuk bandara agar selalu berkoordinasi denganKemenagraria/KepalaBPN dan pemerintah daerah setempat;
- Jika terjadi sengketa terkait hak atas tanah adat khususnya tanah yang ada dalam Besluit van the Netherlands Nieuw Guenja Gouvernour Number 63 in 1961, masing-masing menyiapkan bukti

- konkrit, bukan sekedar foto copy, atas kepemilikan/penguasaan maupun pembayaran tanah tersebut kepada Pemerintah Kolonial;
- Dalam sengketa Pemerintah v MHA akan lebih baik jika mengedepankan musyawarah untuk mufakat; dan
 - Perlu dikaji lebih mendalam mengenai *Besluit van the Netherlands Nieuw Guenja Gouvernour* Number 63 in 1961.

Oleh karena itu tidak selayaknya ada istilah: “*Kami tidak mengakui Negara kalau Negara tidak mengakui Kami*”. Sungguh sangat bijaksana jika MRP, Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, Pemerintah Republik Indonesia c.q Departemen Perhubungan dan Masyarakat Hukum Adat bersepakat mufakat – **setelah dilakukan prosedur penilaian ganti kerugian menurut ketentuan UU 2/2012** – membayar ganti kerugian berupa uang maupun kompensasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat, pendidikan, pekerjaan, serta pengelola bandar udara memberikan CSR (*Corporate Social Responsibility*) kepada Masyarakat Hukum Adat atas tanah yang masuk dalam *Besluit van de Gouvernour Nederlands Nieuw Guenja* Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 22 Februari 1961. Walaupun diperlukan penyediaan biaya yang tidak sedikit, tetapi hal itu antara lain akan:

1. membuat adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah bandar udara sehingga di kemudian hari tidak ada lagi adanya tuntutan ganti rugi dari Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
2. pengolaan atas 13 bandar udara tersebut akan aman dan nyaman dengan dukungan Masyarakat Hukum Adat setempat; dan
3. memakmurkan dan memberdayakan Masyarakat Hukum Adat setempat merupakan tindakan terpuji dari Pemerintah, karena hal itu merupakan bentuk perwujudan Pembukaan UUD 1945.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461).
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900).
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156).
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94).
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223).
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015.
- RUU tentang Perubahan atas UU 21/2001 ttg Otsus Bagi Provinsi Papua.
- RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat.
- Matrix Usulan Perubahan Terhadap RUU PPHMA Versi Baleg.
- Dimas Wahyu Satria: "*Strategi Pertahanan dan Resolusi Konflik*", catatan kuliah cohort 3 Naval Postgraduate School Monterey CA atas kerjasama Program Magister Studi Peace and Conflict Resolution, Indonesian Defense University.
- Prof. M. Mas'ud Said, PhD, Staf Khusus Menteri Sosial: "*Penguatan Kereserian Sosial Dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial*".
- Proposal Focus Group Discussion "*Tuntutan Ganti Rugi Tanah Masyarakat Adat di Papua dan Papua Barat Terhadap Tanah Bandar Udara Yang Masuk Dalam Besluit van Gouvernour van Nederlands Nieuw Guinea Nomor 63 Tahun 1961*".
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2164K/Pdt/2010.